

Analisis Yuridis Terhadap Praktik Paid Promote Akses Ilegal Layanan Streaming Berbayar (Netflix, Disney+, dan Viu) Dalam Perspektif Undang-undang ITE Dan Undang-undang Hak Cipta

Oleh:

Amelia Citra Sasanti,

Dosen Pembimbing : Mochammad Tanzil Multazam

Progam Studi Hukum

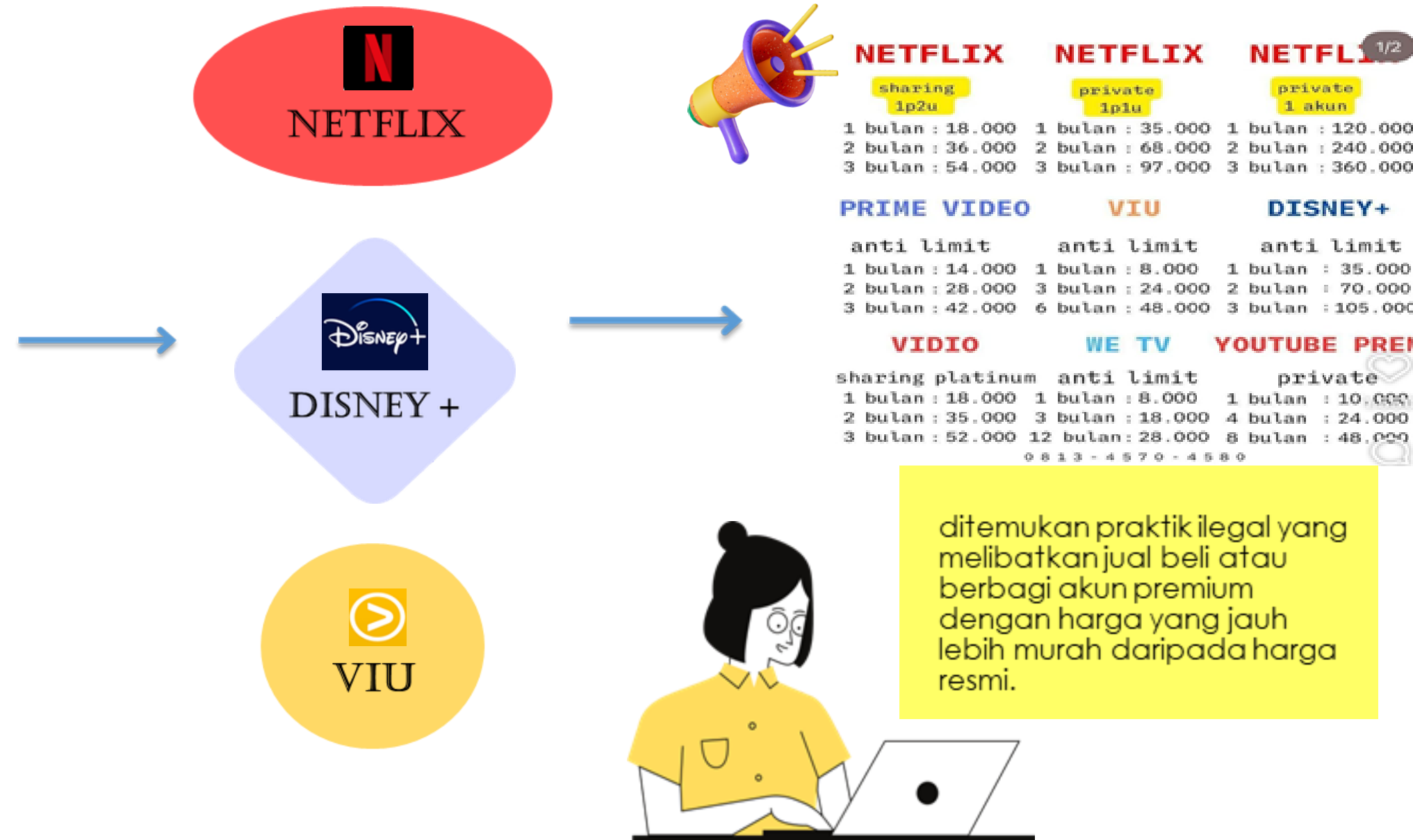
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2026

Pendahuluan



Promosi adalah tindakan memasarkan, menawarkan, mengenalkan, serta mengajak konsumen untuk membeli barang atau jasa. Salah satu tujuan utama dari promosi adalah untuk menarik pelanggan yang diharapkan dapat setia atau berlangganan pada barang atau jasa yang ditawarkan. Berlangganan berarti seseorang secara rutin atau berulang membeli barang atau jasa dalam jangka waktu yang lama



Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)



Rumusan Masalah

kegiatan mempromosikan akses akun netflix, disney dan Viu dengan cara sharing akun melalui paid promote

Pertanyaan Penelitian

apakah kegiatan promosi akun sharing merupakan kegiatan ilegal dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Metode

JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

- Jenis penelitian yuridis normatif
- Pendekatan sistematis
- Berfokus pada peraturan perundang-undangan.



BAHAN HUKUM PRIMER

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta
4. Undang-Undang KUH Perdata pasal 1313 tentang kapan terjadinya perjanjian, dan pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian.



BAHAN HUKUM SEKUNDER

- Bahan hukum sekunder diambil dari Buku, jurnal ilmiah, dan makalah hukum



Hasil

MELANGGAR UU ITE

UU ITE secara tegas melarang akses tanpa hak, penyalahgunaan sistem elektronik, manipulasi data, serta perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga penggunaan akun oleh pihak ketiga tanpa persetujuan penyedia layanan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, terlebih apabila disertai tujuan komersial atau menyebabkan kerugian ekonomi.

MELANGGAR UU HAK CIPTA

Hubungan antara platform seperti Netflix, Disney dan Viu dengan pemilik hak cipta film didasarkan pada perjanjian lisensi atau perjanjian produksi yang bersifat kontraktual, di mana platform membayar imbalan di muka (upfront payment/flat fee) kepada pemegang hak cipta untuk memperoleh hak penayangan film dalam jangka waktu dan wilayah tertentu, tanpa kewajiban pembayaran royalti lanjutan berdasarkan jumlah penonton sehingga penyebaran akun ini berdampak langsung pada platform sebagai pemegang lisensi

MELANGGAR KONTRAK BAKU PLATFORM

Ketentuan syarat dan penggunaan (terms and conditions) dari masing-masing platform streaming berbayar seperti Netflix, Disney+, dan VIU menunjukkan ketiganya secara eksplisit melarang pengalihan akses akun kepada pihak ketiga terutama larangan terkait membagikan informasi login, memberikan hak akses, atau memberikan hak pengguna kepada pihak lain. Dengan demikian, kesadaran hukum pengguna terhadap batasan penggunaan akun digital menjadi penting agar pemanfaatan layanan streaming tetap sejalan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip perlindungan hak serta kepentingan para pihak yang terlibat.


Pembahasan

Alur Pengalihan Akses Layanan Premium Streaming Berbayar



NETFLIX sharing 1p2u	NETFLIX private 1plu	NETFLIX ^{1/2} private 1 akun
1 bulan : 18.000 2 bulan : 36.000 3 bulan : 54.000	1 bulan : 35.000 2 bulan : 68.000 3 bulan : 97.000	1 bulan : 120.000 2 bulan : 240.000 3 bulan : 360.000
PRIME VIDEO anti limit	VIU anti limit	DISNEY+ anti limit
1 bulan : 14.000 2 bulan : 28.000 3 bulan : 42.000	1 bulan : 8.000 3 bulan : 24.000 6 bulan : 48.000	1 bulan : 35.000 2 bulan : 70.000 3 bulan : 105.000
VIDIO sharing platinum	WE TV anti limit	YOUTUBE PREM private
1 bulan : 18.000 2 bulan : 35.000 3 bulan : 52.000	1 bulan : 8.000 3 bulan : 18.000 12 bulan : 28.000	1 bulan : 10.000 4 bulan : 24.000 8 bulan : 48.000


081x - xxxx - xxxx


transaksi biasanya dilakukan melalui jalur pribadi dengan metode pembayaran nonformal, seperti transfer bank atau dompet digital, tanpa perlindungan konsumen yang memadai. Dari sudut pandang hukum sehingga berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta perjanjian kontraktual sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

LOG IN
 @ameliacitrasanti31



Pembahasan

KLAUSUL LARANGAN PENGALIHAN AKSES

NETFLIX

"...kami memberikan Anda lisensi terbatas, non-eksklusif, dan tidak dapat dialihkan untuk mengakses konten dan aktivitas Toko."

...dengan lisensi terbatas tersebut di atas, tidak ada hak, kepemilikan, atau kepentingan yang akan dialihkan kepada Anda.

Anda setuju untuk tidak...menggunakan robot, spider, scraper, atau cara otomatis lainnya untuk mengakses Toko..."

Kami dapat menangguhkan atau mengakhiri akses Anda ke Toko ini jika Anda gagal mematuhi Pernyataan ini

DISNEY+

"Kami memberikan Anda lisensi terbatas, non-eksklusif, tidak dapat disublisensikan, dan tidak dapat dialihkan untuk mengakses dan menggunakan konten tersebut... hanya untuk penggunaan pribadi dan non-komersial Anda..."

...tanpa hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, mengkomunikasikan kepada publik, atau menyediakannya kepada publik..."

VIU

"Anda hanya diizinkan untuk menggunakan Layanan Viu dan menonton Konten untuk penggunaan pribadi dan non-komersial Anda sendiri... Anda setuju bahwa Layanan dan Konten Viu hanya untuk penayangan dan akses pribadi Anda dan Anda tidak akan, atau mengizinkan orang lain untuk, menampilkan, memutar, menggunakan, mengakses, atau menonton Layanan dan/atau Konten Viu untuk tujuan publik atau komersial apa pun..."

Netflix, Disney+ dan VIU secara eksplisit telah menetapkan larangan terhadap pengalihan akses akun dalam ketentuan layanannya, sehingga ketika terjadi pelanggaran, penyedia layanan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak. Dalam kasus seperti ini, pengguna yang membagikan akun secara ilegal berpotensi melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu apabila praktik sharing akun dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam klausul larangan yang tertera di Term Of Use platform maka berpotensi melanggar perjanjian kontraktual yang telah disepakati, selanjutnya jika dilakukan untuk tujuan komersial maka dapat dimaknai sebagai pelanggaran UU Hak cipta, kemudian apabila perbuatan tersebut menyebabkan gangguan terhadap sistem atau pengguna lain, maka memenuhi unsur pelanggaran berdasarkan UU ITE .

Temuan Penting Penelitian

NETFLIX, DISNEY+ DAN VIU MERUPAKAN PLATFORM DENGAN KONTRAK BAKU OTT

- Hubungan platform dengan konsumen didasarkan pada kontak baku yang dibuat secara sepihak oleh platform yang isinya sudah ditentukan sehingga pihak lain tidak memiliki ruang negosiasi substansial
- Hubungan platform dengan pemilik hak cipta didasarkan pada perjanjian lisensi hak cipta yang berlandaskan pada pasal 80 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan pasal 1338 KUHPerdata
- Berbeda dengan hubungan platform dengan konsumen, hubungan platform dengan pemilik hak cipta bersifat kontrak komersial B2B (business to business) standar dan dapat dinegosiasikan terkait substansi ekonomi

KLAUSUL DALAM KONTRAK KOMERSIAL (KONTRAK OTT GLOBAL)

- Untuk lisensi konten (film, series) platform menggunakan kontrak OTT global yang didalamnya memuat terkait : *license fee* (nilai lisensi), *territory* (wilayah), *exclusivity* (eksklusivitas), *term* (jangka waktu)
- Dalam praktik kontrak lisensi OTT selalu terdapat klausul “*License Fee shall be payable in advance upon execution of this Agreement or delivery of the Licensed Content.*” yang maknanya dalam perjanjian lisensi pembayaran dilakukan sebelum hak siar di dapatkan atau dapat di definisikan juga sebagai pembayaran dimuka

KARAKTER DALAM KONTRAK LISENSI

- Karakter dasar kontrak lisensi konten audiovisual (film/series) platform bukan membeli hak cipta melainkan mendapat hak menggunakan (right to exploit) dalam waktu dan wilayah tertentu
- Konsekuensi dalam kontrak lisensi yaitu imbalan lisensi tidak bergantung pada jumlah penonton, melainkan hak akses yang diberikan sejak awal kontrak

Manfaat Penelitian

MANFAAT TEORITIS

- menambah wawasan dan pemahaman mengenai hukum digital, khususnya terkait promosi akun sharing ilegal

MANFAAT PRAKTIS

- artikel ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak hukum dari promosi akun sharing ilegal
- Memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan terkait regulasi yang lebih jelas mengenai promosi akun sharing ilegal di Indonesia
- membantu platform digital dalam menyusun kebijakan yang lebih ketat terkait pelanggaran berbagi akun dan promosi ilegal

Referensi

- [1] L. R. GIRSANG AND I. V. SITUMEANG, "DAYA TARIK IKLAN DAN PAID PROMOTE TERHADAP MINAT BELI @SOBATPROMO," JURNAL KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI, VOL. 16, NO. 1, 2024, DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.23917/KOMUNITI.V16I1.3911](https://doi.org/10.23917/komuniti.v16i1.3911).
- [2] L. F. LESTARI AND S. B. PURWANINGSIH, "PERBANDINGAN AGREEMENT DARI 4 PLATFORM TV BERBAYAR SEPERTI NETFLIX, IQIYI, DISNEY HOTSTAR, DAN WE TV TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN," UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SIDOARJO, VOL. 10, NO. 2, 2024, DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.21070/UPS.6101](https://doi.org/10.21070/ups.6101).
- [3] D. KUMALARANI MAHAKERTY, A. TRI TANTI, S. FITRIYAH, D. ANGELINE ACHMAD, AND K. HANDARIYANTI, "ANALISIS FAKTOR PENGGUNAAN LAYANAN SITUS ILEGAL STREAMING OLEH MAHASISWA ITS DAN HUBUNGANNYA DENGAN UU ITE," JURNAL SOSTECH, VOL. 3, NO. 10, PP. 844–853, OCT. 2023, DOI: [10.59188/JURNALSOSTECH.V3I10.947](https://doi.org/10.59188/journalsostech.v3i10.947).
- [4] S. H. F. ACHYA, I. TRI, AND N. PANGESTI, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN APLIKASIPREMIUM YANG DIPEROLEH DARI PIHAK KETIGA," DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW, VOL. 10, NO. 2, 2023, [ONLINE]. AVAILABLE: [HTTPS://EJOURNAL2.UNDIP.AC.ID/INDEX.PHP/DPLR](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr)
- [5] N. RIZKI, AND P. DWIJAYANTHI, "JUAL-BELI AKUN OVER THE TOP: PERSPEKTIF HAK CIPTA (STUDI KASUS PADA PENJUALAN AKUN NETFLIX SECARA ILEGAL)," KERTHA SEMAYA, VOL. 13, NO. 4, 2025, DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.24843/KS.2025.V13.I04.P10](https://doi.org/10.24843/ks.2025.v13.i04.p10).
- [6] F. RUKMANA AND RAMADHITA, "PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PEMBELIAN AKUN PREMIUM NETFLIX TANPA HAK KOMERSIL," JURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW, VOL. 6, NO. 1, 2022, [ONLINE]. AVAILABLE: [HTTP://URJ.UIN-MALANG.AC.ID/INDEX.PHP/JIBL](http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl)
- [7] N. M. DEWI, I. N. BUDIARTHA, AND N. M. UJIANTI, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LAYANAN JUAL BELI ACCOUNT NETFLIX PREMIUM SECARA ILEGAL," JURNAL ANALOGI HUKUM, VOL. 7, NO. 1, 2025, DOI: [10.22225/JAH.7.1.2025.94-99](https://doi.org/10.22225/jah.7.1.2025.94-99).
- [8] V. A. LATULOLA, S. S. KUAHATY, AND T. L. PESULIMA, "PERLINDUNGAN HUKUM NETFLIX ATAS PENJUALAN AKUN PREMIUM DI MEDIA SOSIAL," PELA, VOL. 3, NO. 1, PP. 45–55, APR. 2024, DOI: [10.47268/PELA.V3I1.13261](https://doi.org/10.47268/pela.v3i1.13261).
- [9] A. P. WIBISONO, "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT DENGAN ENDORSEMENT DI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM," NATIONAL CONFERENCE ON LAW STUDIES, VOL. 2, NO. 1, 2020, [ONLINE]. AVAILABLE: [HTTPS://CONFERENCE.UPNVJ.AC.ID/INDEX.PHP/NCOLS/ARTICLE/VIEW/1344](https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1344)
- [10] B. T. PURNOMO AND M. IMAN, "ANALISIS YURIDIS PENJUALAN AKUN NETFLIX ILEGAL MELALUI MEDIA SOSIAL," INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND JUSTICE, VOL. 1, NO. 3, P. 13, JAN. 2024, DOI: [10.47134/IJL.V1I3.2118](https://doi.org/10.47134/ijl.v1i3.2118).
- [11] N. L. CAHYANI, I. N. BUDIARTHA, AND N. M. UJIANTI, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI AKUN ILEGAL 'NETFLIX' MELALUI MEDIA INTERNET," JURNAL PEVERENSI HUKUM, VOL. 5, NO. 1, 2024, DOI: [10.55637/JPH.5.1.8719.111-117](https://doi.org/10.55637/jph.5.1.8719.111-117).
- [12] S. RAMADHANTY, M. AMIRULLOH, AND T. RAMLI, "PERLINDUNGAN KARYA CIPTA KONTEN TERHADAP PENGUNGGAHAN ULANG DAN PAID PROMOTE PADA AKUN MEDIA SOSIAL," SIMBUR CAHAYA, VOL. 29, NO. 2, 2022, DOI: [10.28946/SC.V29I2.2371](https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.2371).
- [13] N. MUBARIKAH, "KEWAJIBAN ENDORSER ATAS PENGANJURAN SUATU PRODUK PADA MEDIA SOSIAL MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA DALAM PERBANDINGAN DENGAN AMERIKA SERIKAT, INGGRIS DAN INDIA," JURNAL PROGRAM MAGISTER HUKUM UI, VOL. 1, NO. 1, 2021, [ONLINE]. AVAILABLE: [HTTPS://SCHOLARHUB.UI.AC.ID/DHARMASISYA/VOL1/ISS1/13/](https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/13/)
- [14] A. RAHMADANI, M. PARAMITA, S. HAURA, AND F. F, "REGULASI DIGITAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA UNDANG- UNDANG ITE PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL DI INDONESIA," JOURNAL OF SOCIAL CONTEMPLATIVA, VOL. 2, NO. 1, 2024, DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.61183/JSC.V2I1.75](https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.75).
- [15] A. ZAKLYLEN, M. HANIFAH, AND R. LESTARI, "TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI AKUN VIDIO PREMIUM MILIK PT VIDIO OLEH PENGGUNA DI MEDIA SOSIAL DAN MARKETPLACE," JURNAL ILMIAH WAHANA PENDIDIKAN, VOL. 11, NO. 6, 2025, DOI: [HTTPS://JURNAL.PENELITI.NET/INDEX.PHP/JIWP/ARTICLE/VIEW/10696](https://jurnal.peneliti.net/index.php/jiwp/article/view/10696).
- [16] H. LOEN, MASRUKIN, AND J. SANTOSO, "INTERAKSIONISME SIMBOLIK DALAM ERA DIGITAL: PERSEPSI MAHASISWA FISIP UNSOED TERHADAP AKUN SHARING NETFLIX DARI PENJUAL NONRESMI," JOURNAL OF SOCIOLOGY RESEARCH AND EDUCATION, VOL. 6, NO. 2, 2025, DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.53682/K5ZVFC20](https://doi.org/10.53682/k5zvfc20).
- [17] M. YASMIN AND A. RIWANTO, "URGENSI PENGAWASAN LAYANAN SIARAN VIDEO ON DEMAND (VOD) DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN SINGAPURA," JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK, VOL. 8, NO. 2, 2024, DOI: [10.20961/RESPUBLICA.V8I2.85549](https://doi.org/10.20961/respublica.v8i2.85549).
- [18] M. PRATAMA AND L. ABUBAKAR, "FILM LICENSING AGREEMENT AS AN OBJECT OF GUARANTEE IN INDONESIA," RECHTIDE FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA, VOL. 20, NO. 1, 2025, DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.21107/RI.V20I1.28049](https://doi.org/10.21107/ri.v20i1.28049).
- [19] I. YANTI, "PRAKTIK JUAL BELI AKUN SPOTIFY PREMIUM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF," JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW, VOL. 7, NO. 2, 2023, DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.18860/JIBL.V7I2.3249](https://doi.org/10.18860/jibl.v7i2.3249).
- [20] M. PUTRI, J. KOSASIH, AND I. M. PUTRA, "PRAKTIK PENJUALAN AKUN NETFLIX SHARING PREMIUM ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA," JOURNAL OF LAW SCIENCE, VOL. 4, NO. 2, 2025, DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.59011/VJLAWS.4.2.2025.124-135](https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.2.2025.124-135).
- [21] M. DEVI AND SUHERMAN, "LEGAL PROTECTION OF NETFLIX'S DIGITAL CONTENT COPYRIGHT AGAINST ILLEGAL ACCOUNT SHARING PRACTICES IN INDONESIA," JURNAL DAULAT HUKUM, VOL. 8, NO. 4, 2025, DOI: [HTTPS://DX.DOI.ORG/10.30659/JDH.V8I4.49047](https://dx.doi.org/10.30659/jdh.v8i4.49047).
- [22] N. M. INDIRASWARI AND P. UTAMI, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA ACCOUNT NETFLIX PREMIUM SHARING YANG DIPEROLEH SECARA ILEGAL MELALUI PIHAK KETIGA," KERTHA SEMAYA, VOL. 11, NO. 6, 2023, DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.24843/KS.2023.V11.I06.P03](https://doi.org/10.24843/ks.2023.v11.i06.p03).
- [23] D. SERAN, A. WIJAYA, AND S. NUGRAHA, "KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN LAYANAN DIGITAL: ANALISIS PERBANDINGAN PRINSIP HUKUM PERDATA DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN," JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, VOL. 5, NO. 2, 2025, DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.31004/INNOVATIVE.V5I2.18721](https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18721).
- [24] "TERMS & CONDITIONS," NETFLIX SHOP. ACCESSED: JAN. 13, 2026. [ONLINE]. AVAILABLE: [HTTPS://WWW.NETFLIX.SHOP/EN-ID/PAGES/TERMS-CONDITIONS](https://www.netflix.shop/en-id/pages/terms-conditions)
- [25] "ENGLISH – DISNEY TERMS OF USE – UNITED STATES – DISNEY TERMS OF USE." ACCESSED: JAN. 13, 2026. [ONLINE]. AVAILABLE: [HTTPS://DISNEYTERMSOFUSE.COM/ENGLISH/](https://disneytermsfuse.com/english/)
- [26] "TERMS AND CONDITIONS | VIU INDONESIA." ACCESSED: JAN. 13, 2026. [ONLINE]. AVAILABLE: [HTTPS://WWW.VIU.COM/OTT/ID/EN/COPYRIGHT-STATEMENT/TERMS-AND-CONDITIONS](https://www.viu.com/ott/id/en/copyright-statement/terms-and-conditions)
- [27] A. DWIANDARI AND R. ARIFIN, "CRIMINAL LAW ENFORCEMENT ON DIGITAL IDENTITY MISUSE IN AI ERA FOR COMMERCIAL INTERESTS IN INDONESIA," INTERNATIONAL CLINICAL LEGAL EDUCATION, VOL. 7, NO. 1, 2025, DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.15294/ICCLE.V7I1.25525](https://doi.org/10.15294/iccle.v7i1.25525).

